

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor (Kuncoro, 2004). Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi cukup signifikan. Selama delapan tahun terakhir mulai dari tahun 2004 sampai 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan harga konstan tahun 2000 secara rata-rata berada pada angka 4,8 %. Angka tersebut bisa dikatakan cukup baik di tengah krisis yang terjadi di hampir berbagai belahan dunia pada tahun 2007 – 2008. Hal ini dianggap pemerintah sebagai sebuah prestasi tersendiri atas kinerja mereka dalam membuat dan menjalankan kebijakan perekonomiannya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk terus mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara.

Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif

(*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (GDP) atau pendapatan output per kapita. (Muana Nangan, 2001: 279). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dari tahun ke tahun.

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan dari tahun ke tahun yang dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan, sehingga perubahan dalam nilai pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Terdapat variabel ekonomi lain di luar pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau negara, yakni tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah di dalamnya. Ketimpangan pendapatan dalam sebuah proses pembangunan ekonomi adalah sebuah hal yang pasti terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa perlu upaya-upaya tertentu dalam menekan tingkat ketimpangan yang ada sampai pada titik yang serendah mungkin.

Di samping fenomena pertumbuhan yang tidak merata, terdapat masalah lain yang juga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah, yakni tingkat pengangguran. Dalam penelitian (Akai dan Sakata, 2005) dan (Lesman, 2006) menjelaskan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan ketimpangan wilayah, dengan semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan menambah ketimpangan wilayah.

Investasi juga merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah serta menekan ketimpangan antar wilayah. Investasi dibagi menjadi dua yaitu investasi yang dilakukan swasta (penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN)) dan investasi yang dilakukan pemerintah. Investasi yang merata mempunyai peranan penting untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah melalui penyerapan tenaga kerja pada wilayah tersebut dan menekan ketimpangan pendapatan yang terjadi. Namun di lain sisi, investasi juga dapat menyebabkan ketimpangan antar daerah menjadi semakin parah apabila investasi yang dilakukan terjadi tidak merata. Myrdal (1957) dalam Jhingan (2010) menyatakan bahwa permintaan yang meningkat di wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang.

Fenomena ketimpangan antar daerah di Indonesia sudah menarik banyak peneliti untuk melakukan kajian terkait permasalahan tersebut. Salah satunya adalah Sabda Imani Rubiarko (2013) yang melakukan penelitian untuk mengkaji apakah aglomerasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur (2008 – 2012). Dari hasil penelitiannya tersebut diketahui bahwa aglomerasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Sementara itu pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Terakhir, tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Secara teoritis meningkatnya kesenjangan antar daerah atau antar masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kurangnya pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil produksi. Kekurangan tersebut akan menyebabkan rendahnya kemampuan berproduksi, sehingga akan berakibat rendahnya pendapatan keluarga (Almasdi Syahza, 2003).

Provinsi Lampung yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan terletak di ujung selatan Pulau Sumatera juga tidak lepas dari permasalahan disparitas pendapatan. Penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2010 berjumlah 7.608.405 jiwa dan dengan total pendapatan regional 38.305.277

milyar rupiah. Dengan pendapatan per kapita pada tahun 2010 sebesar 5.034.600 rupiah.

Salah satu misi Provinsi Lampung adalah membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdaya saing, namun sekali lagi masalah disparitas tetap menjadi permasalahan klasik yang dihadapi provinsi ini. Hal ini dapat diidentifikasi melalui pendapatan per kapita masyarakat pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 1. PDRB Per Kapita ADHK 2000 (2009 – 2012)

KABUPATEN/KOTA	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
LAMPUNG BARAT	3.559.641,30	3.602.722,84	3.587.813,66	3.562.110,14	3.578.071,99
TANGGAMUS	4.575.382,06	4.386.128,38	4.617.310,35	3.761.861,98	4.335.170,69
LAMPUNG SELATAN	4.359.525,29	4.765.976,97	4.271.706,28	4.441.041,20	4.459.562,44
LAMPUNG TIMUR	4.302.743,19	4.550.100,85	4.139.886,30	4.307.335,66	4.325.016,50
LAMPUNG TENGAH	4.920.486,88	5.320.494,59	5.566.177,70	4.815.660,68	5.155.704,96
LAMPUNG UTARA	5.610.424,58	5.764.752,99	4.586.528,43	4.837.354,68	5.199.765,17
WAY KANAN	3.654.770,89	3.470.810,25	3.622.155,13	3.317.626,03	3.516.340,58
TULANG BAWANG	5.087.415,88	5.683.164,87	5.712.134,65	4.728.694,88	5.302.852,57
PESAWARAN	3.660.239,05	4.165.567,19	4.404.779,03	3.310.729,46	3.885.328,68
PRINGSEWU	3.427.918,49	3.696.931,51	3.916.763,92	3.260.278,12	3.575.473,01
TULANG BAWANG BARAT	5.725.342,21	6.015.305,70	4.731.195,76	4.755.900,91	5.306.936,15
MESUJI	6.008.820,94	6.674.461,18	7.006.813,27	4.388.286,56	6.019.595,49
BANDAR LAMPUNG	7.379.655,82	7.417.230,01	5.509.236,31	5.133.158,85	6.359.820,25
METRO	3.898.070,78	3.866.814,83	3.595.744,90	3.996.253,77	3.839.221,07
LAMPUNG	4.833.490,56	5.076.614,37	4.720.372,47	4.362.917,26	4.748.348,67

Sumber : BPS (diolah)

Pada tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2009 tingkat pendapatan per kapita masyarakat pada 14 kabupaten /kota di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi dan secara rata-rata memiliki besaran yang berbeda. Jika mengacu pada pendapatan per kapita rata-rata dalam kurun waktu 2009 – 2012, maka Kota Bandar Lampung memiliki tingkat pendapatan per kapita tertinggi, kemudian diikuti oleh Kabupaten Mesuji, dan Tulang Bawang. Sementara untuk Kabupaten Pringsewu dan Lampung Barat secara rata-rata memiliki pendapatan per kapita terendah dibandingkan dengan 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. Fakta tersebut merupakan indikasi awal bahwa memang telah terjadi ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung.

Berdasarkan pada uraian di atas, penelitian ini mengambil judul “Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Lampung Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (2001 – 2012).”

B. Rumusan Masalah

Pemerintah (baik pusat maupun daerah) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sebuah strategi perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini artinya ketimpangan pembangunan yang terjadi di antar wilayah kabupaten/kota di Indonesia harus dapat ditekan.

Begitu pula dengan ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung.

Pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran yang sama dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi terhadap peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi mutlak dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dirumuskan tidak salah sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana klasifikasi sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung menurut *tipologi klassen*?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung?
4. Bagaimana pengaruh jumlah pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui klasifikasi sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung menurut *tipologi klassen* .

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
2. Penelitian ini menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang seberapa besar pengaruh pendapatan per kapita, investasi, dan jumlah pengangguran terhadap ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung, sehingga dapat dijadikan referensi tambahan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan menekan tingkat ketimpangan.
3. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti, mahasiswa dan dosen yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, dan investasi (baik PMA maupun PMDN) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah di

Provinsi Lampung. Namun sebelum itu, penelitian ini mencoba untuk mengklasifikasikan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sesuai dengan Tipologi Klassen beserta identifikasi terkait tingkat ketimpangan yang terjadi di dalamnya. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder dari tahun 2001 - 2012 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

F. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan latar belakang di atas bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah belum tentu menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Terdapat indikator lain yang perlu dikaji jika berbicara tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah tingkat ketimpangan kesejahteraan antar wilayah yang terjadi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah tentu berbeda dengan yang lain. Selain dipengaruhi oleh perbedaan potensi daerahnya, ketimpangan yang terjadi juga dipengaruhi oleh strategi pembangunan yang dilakukan. Ketika setiap daerah mampu untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing, maka tingkat ketimpangan yang terjadi dapat ditekan seminim mungkin dan pemerataan kesejahteraan antar daerah dapat terwujud.

Penelitian ini dimulai dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan

mengklasifikasikan 14 kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Lampung ke dalam empat kelompok sesuai dengan Tipologi Klassen. Dari sini dapat diketahui wujud ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Lampung berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat.

Setelah mengetahui klasifikasi daerah yang didasarkan pada Tipologi Klassen, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi tingkat ketimpangan yang terjadi antar daerah di Provinsi Lampung dengan menggunakan perhitungan indeks williamson. Dengan perhitungan ini dapat diketahui secara jelas seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Lampung.

Dan langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisa pengaruh pendapatan per kapita, investasi, dan jumlah pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah di Provinsi Lampung. Dalam mengukur hubungan tersebut digunakan metode regresi linier (*ordinary least square*).

Berikut adalah gambar skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

G. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan berbagai hasil kajian empiris yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian untuk tujuan penelitian yang ketiga sebagai berikut:

- a. Diduga pendapatan per kapita memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung.
- b. Diduga investasi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung
- c. Diduga jumlah pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung.